

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hamid Usman, *Dasar-dasar Hukum Agraria*, Tunas Gemilang, Palembang, 2011.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education dan PuKap Indonesia, Yogyakarta, 2013.
- A. P. Parlindungan, *Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah: Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- _____, *Konversi Hak-hak Atas Tanah*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Bagir Manan, *Akibat Hukum di dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan*, Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2008.
- _____, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, FH-Ull Press, Yogyakarta, 2004.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- _____, *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Efendi Perangin, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- _____, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Fajar Laksono, *Tebaran Gagasan Autentik Prof. Dr. Moh. Mahfud MD: Hukum Tak Kunjung Tegak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, 2012.
- H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- Iain Stewart, *Legal System between Order and Disorder*, Clarendon Press Oxford, Oxford, 2002.

- I Gusti Ayu Putri Kartika, et., al., *Buku Ajar Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010.
- Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- _____, *Proses Terjadinya UUPA, Peran serta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Jerzy Stelmach and Bartosz Brożek, *Methods of Legal Reasoning*, Springer, Cambridge, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Jörg Kammerhofer, *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective*, London and New York, Routledge, 2010.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Maria S. W. Sumardjono, et., al., *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Moh. Hasan Wargakusumah, *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2000.
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Novianto M. Hantoro, et., al., *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta, 2012.
- Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, HuMa dan Magister Hukum UGM, Jakarta, 2007.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Laporan Akhir Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah: Analisis di Tingkat Wilayah dan Rumah Tangga Petani*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bogor, 2019.
- Rachmat Trijono, *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013.
- Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2018.
- _____, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006.
- Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan: Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Salim H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sigit Riyanto, Maria S. W. Sumardjono, et., al., *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta, 1988.
- Soedjarwo Soeromihardjo, et., al., *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani, Bunga Rampai: Fokus pada Mengangkat Harkat Petani*, Lembaga Pengkajian Pertanahan Indonesia, Jakarta, 2008.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- _____, dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Tim Penyusun, *Panduan Penerapan Metode Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment-RIA) di Lingkungan DPR-RI*, Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2008.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Wicipto Setiadi, et., al., *Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 2010.
- Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Y. W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria: Beberapa Pemikiran*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Tesis

- Dwi Ratna Cinthya Dewi, *Inconsistency Norm (Norma Hukum yang Tidak Konsisten) dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*, Program Studi Al-Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Malang, 2017.
- Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.
- Ruben Sianipar, *Analisis Yuridis Pemberian Hak Guna Usaha Terhadap Perusahaan Asing dalam Bentuk Joint Venture Setelah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.
- Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Disertasi

- Romi Librayanto, *Sistem Norma Hukum dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum yang Ideal: Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan di Indonesia*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Jurnal

- Ibnu Sina Chandranegara, *Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 26, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

- I Gede Panca Sudiarta dan Desak Putu Dewi Kasih, *Kepastian Hukum bagi Investor dalam Perpanjangan Hak Guna Usaha*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 2, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar-Bali, 2021.
- Ni Ketut Krismanika, I Putu Gede Seputra, et., al., *Pemberian Hak Guna Usaha di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Marwadewa, Denpasar-Bali, Agustus 2020.
- Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17, Nomor 3, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2020.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Jurnal Yuridika, Volume 7, Nomor 5-6, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, September-Desember 1997.
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-norma dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Volume 44, Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.
- Urip Santoso, *Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juni 2012.
- Wasis Susetio, *Disharmoni Peraturan Perundang-undangan di Bidang Agraria*, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 10, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2013.
- Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 4, Nomor 2, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, Juni 2007.

Peraturan-peraturan

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021-022/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Seminar

Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar Nasional, disampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, pada tanggal 13 Mei 2000.

Benny Riyanto, *Penerapan Regulatory Impact Assessment dalam Pembentukan Regulasi*, Paper Webinar, disampaikan pada webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 20 September 2021.

Gunawan Wiradi, *Sejarah UUPA-1960 dan Tantangan Pelaksanaannya selama 44 Tahun*, Makalah Seminar, disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh FSPI, Jakarta, pada tanggal 2 September 2004.

L. M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum menuju Hukum Responsif*, Makalah Seminar, disampaikan pada pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, pada tanggal 14 Oktober 1995.

Maria S. W. Sumardjono, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Tanah*, Makalah Seminar Nasional, disampaikan dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta, Yogyakarta, 13 September 1997.

Nurhasan Ismail, *Catatan Terjadinya Inkonsistensi Internal dan Vertikal Substansi PP 18 Tahun 2021*, Paper Webinar, disampaikan pada webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 20 September 2021.

Daring

A. A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, 2010, dalam http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180, diakses pada tanggal 6 Maret 2022 pukul 20:50 WITA.

Acil Akhriuddin, *PP Nomor 18 Tahun 2021 Atur Kepemilikan dan Kebermanfaatan Tanah*, 2021, dalam <https://kabarnotariat.id/2021/03/21/pp-nomor-18-tahun-2021-atur-kepemilikan-dan-kebermanfaatan-tanah/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021 pukul 13:16 WITA.

- Ardiansyah Fadli, *PP 18/2021 Perkuat Hak Pengelolaan Rumah Susun*, 2021, dalam <https://www.kompas.com/properti/read/2021/04/21/190000821/pp-18-2021-perkuat-hak-pengelolaan-rumah-susunpage=2>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 19:48 WITA.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademis Penyusunan RUU Pertanahan*, 2016, dalam <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20160916-102549-6280.pdf>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 19:47 WITA, hal. 1.
- Insist Press, *Proses Pembentukan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960*, 2011, dalam <https://insistpress.com/2011/09/28/proses-pembentukan-uu-pokok-agraria-no-5-tahun-1960/>, diakses pada tanggal 08 Maret 2022 pukul 20:00 WITA.
- Maria S. W. Sumardjono, *Tata Kelola Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja*, 2021, dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/16/tata-kelola-pertanahan-pasca-uu-ciptakerja/?statusregister=register&statuslogin=login>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 12:30 WITA.
- Shidarta dan Petrus Lakonawa, *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya*, 2018, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-general/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2022 pukul 20:42 WITA.

LAMPIRAN

Tabel 2.1 Inventarisasi Bahan Hukum.

No.	Sumber Bahan Penelitian	Jenis		Keterangan
1	Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	Bahan Primer	Hukum	Sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
2	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	Bahan Primer	Hukum	Seluruh ketentuan pasal beserta penjelasannya.
3	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Bahan Primer	Hukum	Pasal 22 sebagaimana yang dimaksud berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021-022/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Bahan Primer	Hukum	Sebagaimana dimaksud berdasarkan pasal 136-147.
5	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Primer	Hukum	Sebagaimana dimaksud berdasarkan pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2-4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 58 ayat (1 dan 2), Bab XA mengenai Pemantauan dan Peninjauan, Lampiran I dan Lampiran II.
6	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah	Bahan Primer	Hukum	Sebagaimana dimaksud berdasarkan pasal 2-18.
7	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.	Bahan Primer	Hukum	Sebagaimana dimaksud berdasarkan pasal 19-33. Terkait dengan pemberian HGU.
8	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.	Bahan Primer	Hukum	Sebagaimana dimaksud berdasarkan paragraf 2-3.
9	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021-022/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Bahan Primer	Hukum	Terkait dengan makna pemberian HGU di muka sekaligus yang dinilai oleh MK dengan indikator makna dikuasai negara dan demokrasi ekonomi pada UUD 1945.
10	Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	Bahan Primer	Hukum	Terkait dengan makna dikuasai negara pada UUD 1945.
11	Disertasi, yang disusun oleh Romi Librayanto, berjudul <i>Sistem Norma Hukum dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum yang Ideal: Kajian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan di Indonesia</i> , pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana	Bahan Sekunder	Hukum	Terkait dengan konflik norma, sinkronisasi vertikal dan harmonisasi horizontal.

	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, di Kota Makassar, Tahun 2016.		
12	Seluruh sumber yang berasal dari buku, jurnal, tesis, makalah atau paper seminar hukum dan sumber daring yang tertera pada daftar pustaka.	Bahan Hukum Sekunder	Terkait aspek-aspek hukum HGU dalam dinamikanya sebelum dan sesudah diterbitkannya UU Cipta Kerja.